



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 28 Januari 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penjelasan Pemerintah terkait Aset Negara
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 28 (dua puluh delapan) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Sekretaris Negara C. Wakil Sekretaris Kabinet

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara dan Wakil Sekretaris Kabinet, dengan agenda Penjelasan Pemerintah terkait Aset Negara, hari Selasa, 28 Januari 2020, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Negara di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara:
 - a. Kantor Kemensetneg: sumur biopori dan solar cell
 - b. Istana Tampaksiring: penghijauan kawasan dengan masyarakat sekitar
 - c. Istana Bogor & Istana Cipanas: penanaman kembali beberapa pohon langka dan pembangunan embung, sumber air bagi masyarakat sekitar
 - d. Kawasan GBK: hutan kota dengan pepohonan dan aneka vegetasi beragam, serta mengurangi polusi udara; sarana berekreasi dan berolahraga dan obyek wisata
 - e. Kawasan Kemayoran: konsep Three Wonderful Journey dan Utan Kota Kemayoran dengan fungsi penghijauan, sarana berolahraga serta laboratorium pendidikan

2. Nilai Barang Milik Negara Sekretariat Kabinet per 31 Desember 2019 (Unaudited)

Sekretariat Kabinet secara tugas dan fungsi tidak secara spesifik mengelola Aset Negara. Adapun Barang Milik Negara (BMN) untuk menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH		
		NILAI BMN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1.	Tanah dan Bangunan	0	0	0
2.	Peralatan dan Mesin (kendaraan bermotor, alat pengolah data, dan peralatan mesin lainnya)	64.331.469.168	45.937.235.556	18.394.233.612
3.	Aset Tetap lainnya (aset tetap renovasi lantai 3 dan 4 serta buku-buku perpustakaan)	11.727.137.662	0	11.727.137.662
4.	Aset Tak Berwujud (<i>software/aplikasi, lisensi, dan e-book</i>)	4.020.573.923	3.303.246.058	717.327.865
5.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (inventarisasi peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat)	1.254.039.382	1.254.039.382	0
6.	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (<i>software/aplikasi yang sudah ketinggalan jaman sehingga tidak dapat menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet</i>)	5.319.320.454	5.319.320.454	0
	Jumlah	86.652.540.589	55.813.841.450	30.838.699.139

III. KESIMPULAN

1. Dalam rangka peningkatan pengawasan pengelolaan aset secara berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara terutama pada BLU PPKGBK dan BLU PPKK, Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Sekretaris Negara untuk mengembalikan pemanfaatan asset-aset tersebut sebagai sarana pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dengan tidak hanya mengedepankan aspek komersial.
2. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas aset khususnya optimalisasi pendapatan negara di BLU PPKGBK dan BLU PPKK, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Sekretaris Negara untuk membuat strategi portofolio aset yang didasarkan pada evaluasi kinerja keuangan, sehingga dapat ditentukan secara tepat asset-aset yang dikerjasamakan dan didayagunakan kepada pihak ketiga maupun yang dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan Kementerian/Lembaga.
3. Dalam rangka penguatan posisi negara saat berhadapan dengan sejumlah mitra usaha yang memanfaatkan aset negara di BLU PPKGBK dan BLU PPKK, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Sekretariat Negara untuk mengkaji ulang semua perjanjian kerja dengan mitra usaha yang telah ditandatangani.
4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Sekretariat Negara untuk memberikan rincian data pihak-pihak yang memanfaatkan aset negara yang dikelola BLU PPKGBK dan BLU PPKK.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.10 WIB.

Jakarta, 28 Januari 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG *Ans*

A-270